



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2015 - 2016.
Masa Persidangan ke-	: IV (empat).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Hari/Tanggal	: Selasa, 26 April 2016.
Pukul	: 13.30WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ir.H.A.R. Sutan Adil Hendra M.M. / Wk.Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Kesiapan pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2016 tingkat SMP dan sederajat; 2. Penyelesaian Guru Honorer; 3. Tindak lanjut Uji Kompetensi Guru; 4. Perkembangan rancangan tahapan proses sertifikasi guru yang belum memiliki sertifikat; 5. Program Kerja Kemendikbud terhadap Hari Pendidikan, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Buku Nasional, dan Hari Buku Dunia; 6. Penyampaian Rekomendasi Panja Perfilman Nasional; dan 7. Lain-lain.
Hadir	: 30 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.45 WIB oleh Ketua Komisi X DPR RI/ Teuku Riefky Harsya setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 Ayat (1) dan Pasal 246 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Kesiapan pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2016 tingkat SMP dan sederajat

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi langkah-langkah Kemendikbud RI untuk terus meningkatkan persiapan dan kesiapan pelaksanaan UNBK dan UNKP dari sisi sosialisasi, koordinasi, dan penyediaan sarana prasarana UN, utamanya kesiapan infrastruktur jaringan internet dan kesiapan sumber energi listrik.
2. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk merancang dan membahas penyamaan jadwal UNBK dan UNKP di masa mendatang.

B. Penyelesaian Guru Honorer

1. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk berkoordinasi dengan K/L terkait, untuk menyeimbangkan rasio jumlah guru dan siswa sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, sehingga terjadi pemerataan pemenuhan kebutuhan guru di daerah dengan memperhatikan sistem seleksi penerimaan dan pengangkatan guru honorer.
2. Komisi X DPR RI mengapresiasi langkah Kemendikbud RI menerbitkan Neraca Pendidikan Daerah, data tersebut dapat dipergunakan untuk melaksanakan bidang pengawasan dan peningkatan mutu pendidikan di daerah.

C. Tindak Lanjut Uji Kompetensi Guru

Terkait penjelasan tindak lanjut Uji Kompetensi Guru (UKG) sebagaimana dijelaskan pada paparan halaman 24, hasil UKG yang menjadi acuan bagi Pemerintah untuk memberikan jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan guru, Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk terus melakukan sosialisasi dan memberikan laporan perkembangan pelaksanaan program Guru Pembelajar.

D. Perkembangan rancangan tahapan proses sertifikasi guru yang belum memiliki sertifikat

1. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk meningkatkan jumlah penerima program Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PL-PG) yang diselenggarakan Pemerintah agar jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan khususnya peningkatan kualitas guru, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI agar program sertifikasi guru tidak dikenakan pungutan biaya yang dibebankan kepada guru peserta Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PL-PG) tetapi seluruh biaya ditanggung oleh Pemerintah.

E. Program Kerja Kemendikbud terhadap Hari Pendidikan, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Buku Nasional, dan Hari Buku Dunia;

Terkait peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buku Nasional sebagai Gerakan Budaya dan Peningkatan Budaya Literasi yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk mensosialisasikan dan mempersiapkan acara tersebut sebaik-baiknya.

F. Penyampaian Rekomendasi Panja Perfilman Nasional

Komisi X DPR RI menyampaikan Laporan Panja Perfilman Nasional kepada Kemendikbud RI, agar hasil rekomendasi Panja Perfilman Nasional menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perfilman nasional selanjutnya.

G. Lain-lain

1. Terkait adanya informasi akan dikurangnya alokasi anggaran Kemendikbud RI pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2016, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk mempertahankan alokasi anggaran pada RAPBN-P TA 2016 sekurang-kurang sama dengan APBN TA 2016 sebesar Rp.49.2T.
2. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk mensosialisasikan kebijakan Kurikulum 2013 secara berkelanjutan yang akan dipakai dalam proses pembelajaran pada tahun pelajaran berikutnya.
3. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk mempersiapkan landasan hukum Wajib Belajar 12 Tahun.
4. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI segera berkoordinasi dengan Kemensos RI untuk memberikan penghargaan kepada guru yang telah mengabdikan di daerah 3T.

III. PENUTUP

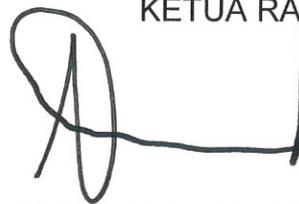
Rapat ditutup pada pukul 15.25 WIB

MENDIKBUD RI,



ANIES BASWEDAN

KETUA RAPAT,



IR.H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA M.M.